



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 86 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri menetapkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan ditetapkan paling lambat bulan April setiap Tahun oleh Menteri berdasarkan masukan dari Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 700.1.1.2/2644/IJ tanggal 25 Nopember 2024 perihal Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Nomor 157 Tahun 2019);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;

17. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700.1.1.2/2644/IJ tanggal 25 Nopember 2024 perihal Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025 dengan Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 diarahkan sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan” sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Berbasis Risiko Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan objek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Berbasis Risiko Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini digunakan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat Daerah.

KEEMPAT : Kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini terdiri dari atas :

a. Kegiatan asurans meliputi :

1. Audit ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/arca yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku meliputi :
 - a) audit operasional, meliputi :
 - b) audit dengan tujuan tertentu, meliputi :
 - 1) audit probiti; dan
 - 2) audit tematik pengelolaan dana khusus maupun tematik lain sesuai isu-isu strategis.
 - c) Audit investigasi.

2. Audit kinerja untuk memastikan aspek efisiensi, efektifitas, dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program/ kegiatan.

3. Asurans atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh meliputi :

a) revidir, meliputi :

- 1) tata kelola barang milik daerah;
- 2) optimalisasi pendapatan asli daerah;
- 3) tata kelola perizinan;
- 4) laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024; dan
- 5) rencana tindak pengendalian perangkat daerah tahun 2025.

b) monitoring/evaluasi/pemantauan, meliputi :

- 1) pengendalian gratifikasi;
- 2) implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah;
- 3) pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 4) pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 5) rencana tindak pengendalian manajemen risiko perangkat daerah tahun 2025;
- 6) penilaian mandiri pelaksanaan birokrasi perangkat daerah;
- 7) pelaksanaan zona integritas perangkat daerah;
- 8) penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah perangkat daerah;
- 9) pengendalian benturan kepentingan;
- 10) pengadaan barang/jasa;
- 11) pelaksanaan *whistle blower system*; dan
- 12) pelaksanaan program terkait isu strategis pemerintah daerah.

4. Asurans lainnya :

a) Revidir :

- 1) dokumen perencanaan daerah (revidir rencana kerja pemerintah daerah perubahan tahun 2025, revidir rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026, revidir dokumen rencana kerja perubahan tahun 2025, dan revidir dokumen rencana kerja tahun 2026);
- 2) dokumen anggaran daerah (revidir kebijakan umum anggaran/penetapan plafon anggaran sementara perubahan tahun 2025, revidir kebijakan umum anggaran/penetapan plafon anggaran sementara tahun 2026, revidir rencana kerja anggaran perubahan tahun 2025, dan revidir rencana kerja anggaran tahun 2026);
- 3) dokumen penatausahaan keuangan daerah (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik, revidir penyerapan anggaran, revidir serapan pengadaan barang dan jasa;
- 4) dokumen laporan keuangan daerah (revidir laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024);
- 5) standar Satuan Harga (Analisis Satuan Belanja; dan

- 6) *monitoring centre for prevention* komisi pemberantasan korupsi.
- b) Monitoring/evaluasi/pemantauan, meliputi :
 - 1) pelaksanaan laporan harta kekayaan ASN;
 - 2) pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - 3) penelitian dan penelaahan informasi;
 - 4) survei penilaian integritas;
 - 5) fasilitasi sapu bersih pungutan liar;
 - 6) fasilitasi tim penyelesaian kerugian daerah; dan
 - 7) kegiatan konsultasi.
- b. Kegiatan konsultansi berupa bantuan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja melalui kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan perangkat daerah/unit kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern meliputi :
 1. layanan konsultasi;
 2. pendampingan;
 3. sosialisasi; dan
 4. bimbingan teknis.
- c. Kegiatan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah meliputi :
 1. pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan berbasis teknologi informasi;
 2. penilaian mandiri kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
 3. evaluasi program dan kegiatan internal;
 4. evaluasi regulasi pengawasan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Inspektur Daerah;
 5. perencanaan pengawasan berbasis risiko;
 6. pendidikan berjenjang jabatan fungsional auditor dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
 7. pendidikan sertifikasi dibidang pengawasan lainnya;
 8. penataran Kantor Sendiri; dan
 9. telaah sejawat.

KELIMA : Pelaksanaan Kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Inspektur Daerah bertugas menyampaikan laporan hasil kerja pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 20 - 2 - 2025

Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

DIMPOSMA SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Pembina (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 86 TAHUN 2025
TANGGAL : 20-02-2025
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN
2025

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN.

A. Pendahuluan.

Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025 merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan dilingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan audit berbasis risiko. Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko lebih besar akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko.

B. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara; dan
2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersinergi.

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis pemerintah daerah.

C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun sebagai berikut :

1. Pengawasan Keuangan/Ketaatan, Kinerja Perangkat Daerah dan Audit Tujuan Tertentu;
2. Kegiatan Reviu;
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi;

4. Kegiatan Jasa Konsultansi dan Sosialisasi;
5. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan;
6. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat; dan
7. Kegiatan pengawasan lainnya.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

A. Perencanaan.

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025 berdasarkan skala prioritas dan hasil analisis risiko.

Penetapan besaran risiko akan menentukan auditan yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk tim;
2. Menyusun daftar obyek pemeriksa;
3. Melakukan rekapitulasi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh perangkat daerah;
4. Mengidentifikasi faktor risiko program dan kegiatan strategis pemerintah daerah;
5. Menentukan Skala Prioritas dalam penentuan obyek pemeriksaan;
6. Menetapkan bobot/besaran risiko atas seluruh auditan;
 - a. Setiap auditan ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan.
 - b. Besaran risiko auditan dirumuskan dengan meminta masukan dari auditan, dan jika auditan memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
 - c. Penetapan besaran risiko tiap auditan dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
7. Menentukan tingkat risiko;
8. Menetapkan penyusunan prioritas area pengawasan, jenis pengawasan, daftar pengawasan yang wajib dilakukan (*mandatory*) instansi vertikal.

B. Pelaksanaan.

1. Pembinaan.

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain dilakukan melalui :

- a. Pembinaan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Perangkat daerah; dan
- b. Pemberian layanan Konsultansi.

2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja.

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Meliputi beberapa aspek yaitu :

- a. Kebijakan;
- b. Kelembagaan;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi;
- d. Pengelolaan Keuangan;

- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- f. Capaian Kinerja.

Audit Tujuan Tertentu, yang terdiri dari :

- a. Audit Khusus Kas Opname dan Stok Opname;
- b. Audit Khusus Pendapatan Asli Daerah;
- c. Audit Khusus Fisik Proyek;
- d. Audit Khusus Dana Desa;
- e. Audit Khusus Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- f. Audit Khusus Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- g. Probity Audit; dan
- h. Audit Tujuan tertentu lainnya.

3. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan.

Masyarakat Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam menindaklanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat, lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan status Pemeriksaan, Pelimpahan Pemeriksaan dari Perangkat Daerah terkait dan atau atas Perintah Pimpinan yang berwenang (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Inspektur).

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas sebagai berikut :

- a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Penyalahgunaan wewenang;
- c. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- d. Pelanggaran disiplin pegawai.

4. Kegiatan Reviu.

Kegiatan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas sebagai berikut :

- a. Reviu Rencana Pemerintah Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra;
- b. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Murni dan Perubahan;
- c. Reviu Renja Murni dan Perubahan;
- d. Reviu Benturan Kepentingan;
- e. Reviu Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- f. Reviu Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisa Standar Belanja Dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Murni Dan Perubahan;
- g. Reviu Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Murni dan Perubahan;
- h. Reviu Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Murni dan Perubahan;
- i. Reviu Tata Kelola Kepatuhan;
- j. Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- k. Reviu Tata Kelola Pajak;
- l. Reviu Alokasi Dana Alokasi Khusus Reguler;
- m. Reviu Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik;
- n. Reviu Belanja Tidak Terduga;
- o. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas:

- a. Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/Irjen Kementerian;
- d. Dana Desa;
- e. Aksi Pencegahan Korupsi;
- f. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko;
- g. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
- h. Penanganan Laporan Gratifikasi;
- i. Penanganan Benturan Kepentingan;
- j. Penilaian Internal Zona Integritas;
- k. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- l. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- m. Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;
- n. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- o. Inflasi Daerah;
- p. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- q. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- r. Pelayanan Publik;
- s. Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- t. Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar;
- u. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal;
- v. Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa;
- w. Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
- x. Whistle Blowing System; dan
- y. Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

6. Kegiatan Jasa Konsultansi.

Layanan Jasa Konsultansi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan saran, pelatihan dan/atau fasilitasi terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Dalam konsultansi, auditor tidak dituntut untuk memberikan suatu pendapat atau penilaian independen.

Dengan layanan Konsultansi diharapkan dapat mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai *Early Warning System* (sistem peringatan dini) terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan sebagai upaya memperkuat Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

7. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan.

Kegiatan Asistensi/Pendampingan, meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, penyusunan capaian keuangan, perencanaan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan kegiatan asistensi lainnya.

8. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan tersebut di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Telaah Sejawat antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Internal Aparat Pengawas Intern Pemerintah (antar Irbanwil/Sus) dan Layanan Jasa Konsultansi.

C. Pelaporan.

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan;
2. Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan wajib dilakukan reviu secara berjenjang;
3. Laporan Hasil Pengawasan dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; dan
4. Laporan Hasil Pengawasan disampaikan kepada Bupati Tapanuli Utara melalui Sekretaris Daerah.

Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

DIMPOSMA SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
 NOMOR : 86 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 - 02 - 2025
 HAL : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 BERBASIS RISIKO TAHUN 2025

PROGRAM KERJA BERBASIS RISIKO BERBASIS RISIKO TAHUN 2025

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Pengampu
					RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I																	
1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Monitoring Disiplin ASN Awal Tahun 2025	Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan Wilayah Kerja Irban I	Megetahui tingkat kehadiran sebagai bentuk disiplin ASN pada awal Tahun 2025	Minggu ke-1 Januari 2025	Minggu ke-2 Januari 2025	1	1	1	1	9	11	4.290.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan, Kendaraan	Manajemen Pimpinan	Irban Wilayah I
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban I (Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Inspektorat Daerah, Dinas Kominfo, Sekretariat Daerah, Kecamatan Adiankoting, Siborong-borong dan Pangaribuan)	Melakukan Penutupan Buku Kas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-2 Januari 2025	Minggu ke-2 Januari 2025	0	0	1	1	9	11	4.290.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah I
		Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban I (Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Inspektorat Daerah, Dinas Kominfo, Sekretariat Daerah, Kecamatan Adiankoting, Siborong-borong dan Pangaribuan)	Memastikan PA/KPA/PPK/PPTK/ Bendahara Perangkat Daerah melakukan pengelolaan kas, Aset, surat pertanggungjawaban pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-2 Januari s/d Minggu ke-3 Januari 2025	Minggu ke-4 Januari 2025	0	0	1	1	9	11	12.870.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah I
3	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Dana BOS	SD dan SMP di Kecamatan Siborong-borong	Memastikan Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis	Minggu ke-4 Januari s/d Minggu ke-1 Pebruari 2025	Minggu ke-2 Pebruari 2025	0	0	1	1	9	11	21.450.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I
			SD dan SMP di Kecamatan Adiankoting	Memastikan Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis	Minggu ke-2 Pebruari s/d Minggu ke-3 Pebruari 2025	Minggu ke-4 Pebruari 2025	0	0	1	1	9	11	17.160.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I
			SD dan SMP di Kecamatan Pangaribuan	Memastikan Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis	Minggu ke-4 Pebruari s/d Minggu ke-1 Maret 2025	Minggu ke-2 Maret 2025	0	0	1	1	9	11	18.480.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I
4	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Ketaatan	Kantor Kecamatan Adiankoting	Menilai kecukupan atas Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Minggu ke-2 Maret 2025	Minggu ke-3 Maret 2025	0	0	1	1	9	11	8.580.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I
			Kantor Kecamatan Siborongborong	Menilai kecukupan atas Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Minggu ke-3 Maret 2025	Minggu ke-4 Maret 2025	0	0	1	1	9	11	8.580.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I
			Kantor Kecamatan Pangaribuan	Menilai kecukupan atas Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Minggu ke-4 Maret s/d Minggu ke-1 April 2025	Minggu ke-2 April 2025	0	0	1	1	9	11	13.860.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I
5	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Ketaatan	UPT Puskesmas Parsikkaman Kecamatan Adiankoting	Menilai kecukupan atas Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Minggu ke-2 April 2025	Minggu ke-3 April 2025	0	0	1	1	9	11	5.720.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I
			UPT Puskesmas Panieran Kecamatan Siborongborong	Menilai kecukupan atas Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Minggu ke-3 April 2025	Minggu ke-4 April 2025	0	0	1	1	9	11	8.580.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Pengampu
					RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			UPT Puskesmas Siborongborong Kecamatan Siborongborong	Menilai kecukupan atas Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Minggu ke-4 April 2025	Minggu ke-1 Mei 2025	0	0	1	1	9	11	7.150.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I
			UPT Puskesmas Silangit Kecamatan Siborongborong	Menilai kecukupan atas Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Minggu ke-1 Mei 2025	Minggu ke-2 Mei 2025	0	0	1	1	9	11	8.580.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I
			UPT Puskesmas Pangaribuan Kecamatan Pangaribuan	Menilai kecukupan atas Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Minggu ke-2 Mei 2025	Minggu ke-3 Mei 2025	0	0	1	1	9	11	6.160.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I
			UPT Puskesmas Lumban Sinaga Kecamatan Pangaribuan	Menilai kecukupan atas Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Minggu ke-3 Mei 2025	Minggu ke-4 Mei 2025	0	0	1	1	9	11	9.240.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I
6	Pengawasan Desa	Pemeriksaan Keuangan Desa	Pengelolaan Anggaran Desa (DD/ADD) Tahun 2024 Kecamatan Siborong-borong	Mengetahui sejauh mana pengelolaan Keuangan DD/ADD Tahun Anggaran 2024	Minggu ke-4 Mei s/d Minggu ke-4 Juni 2025	Minggu ke-5 Juni 2025	0	0	1	1	9	11	31.460.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I
			Pengelolaan Anggaran Desa (DD/ADD) Tahun 2024 Kecamatan Adiankoting	Mengetahui sejauh mana pengelolaan Keuangan DD/ADD Tahun Anggaran 2024	Minggu ke-5 Juni s/d Minggu ke-2 Juli 2025	Minggu ke-3 Juli 2025	0	0	1	1	9	11	25.740.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I
			Pengelolaan Anggaran Desa (DD/ADD) Tahun 2024 Kecamatan Pangaribuan	Mengetahui sejauh mana pengelolaan Keuangan DD/ADD Tahun Anggaran 2024	Minggu ke-3 Juli s/d Minggu ke-2 Agustus 2025	Minggu ke-3 Agustus 2025	0	0	1	1	9	11	36.960.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I
7	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban I (Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian Inspektorat, Dinas Kominfo, Sekretariat Daerah)	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban I pada Tahun Anggaran 2024 dengan menilai Kecukupan atas kinerja dengan orientasi Ekonomis, Efisien dan Efektif (3E)	Minggu ke-3 Agustus s/d Minggu ke- 1 September 2025	Minggu ke-2 September 2025	0	0	1	1	9	11	21.120.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I
8	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Monitoring Penyerapan APBD	Perangkat Daerah dan Kecamatan di Wilayah Kerja Irban I	Memastikan Penyerapan APBD Perangkat Daerah pada Semester I Tahun 2025 sesuai dengan RAK	Minggu ke-2 September 2025	Minggu ke-3 September 2025	0	0	1	1	9	11	8.580.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah I
9	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Keuangan	PDAM Mual Natio	Memastikan PA/KPA/PPK/PPTK/ Bendahara Perangkat Daerah melakukan pengelolaan kas, Aset, surat pertanggungjawaban pada SPDAM Mual Natio Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-3 September 2025	Minggu ke-4 September 2025	0	0	1	1	9	11	7.920.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah I
10	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP	TLHP BPK dan TLHP APIP	Monitoring TLHP BPK dan TLHP APIP pada Wilayah Kerja Irban I dan Kecamatan Adiankoting, Siborong dan Pangaribuan	Mengetahui sejauhmana TLHP Semester I Tahun 2025 telah diselesaikan oleh Objek yang diperiksa	Minggu ke-4 September s/d Minggu ke-5 September 2025	Minggu ke-1 Oktober 2025	0	0	1	1	9	11	18.480.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah I
11	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengaduan Masyarakat	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat terhadap Objek di Wilayah Kerja Irban I	Memastikan pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat terhadap Objek Pemeriksaan	Minggu ke-1 Oktober s/d Minggu ke-2 Oktober 2025	Minggu ke-3 Oktober 2025	0	0	1	1	9	11	17.160.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah I
12	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Fisik pada Perangkat Daerah di Kecamatan Adiankoting	Memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari DAK/DAU Fisik dan Non Fisik pada Dinas Pertanian sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-3 Oktober s/d Minggu ke-4 Oktober 2025	Minggu ke-1 November 2025	0	0	1	1	9	11	17.160.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	3,12 (Tinggi)	Irban Wilayah I
			Pemeriksaan Fisik pada Perangkat Daerah di Kecamatan Pangaribuan	Memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari DAK/DAU Fisik dan Non Fisik pada Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-1 November s/d Minggu ke-2 November 2025	Minggu ke-3 November 2025	0	0	1	1	9	11	18.480.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah I
13	Pengawasan Desa	Pemeriksaan Keuangan Desa	Pengelolaan Anggaran Desa (DD/ADD) Tahun 2025 Kecamatan Siborong-borong	Mengetahui sejauh mana pengelolaan Keuangan DD/ADD Tahun 2025	Minggu ke-3 November 2025	Minggu ke-4 November 2025	0	0	1	1	9	11	8.580.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah I

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Pengampu
					RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pengelolaan Anggaran Desa (DD/ADD) Tahun 2025 Kecamatan Pangaribuan	Mengetahui sejauh mana pengelolaan Keuangan DD/ADD Tahun 2025	Minggu ke-4 Nopember 2025	Minggu ke-1 Desember 2025	0	0	1	1	9	11	9.240.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah I
			Pengelolaan Anggaran Desa (DD/ADD) Tahun 2025 Kecamatan Adiankoting	Mengetahui sejauh mana pengelolaan Keuangan DD/ADD Tahun 2025	Minggu ke-1 Desember 2025	Minggu ke-2 Desember 2025	0	0	1	1	9	11	8.580.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah I
14	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Monitoring Penyerapan APBD	Perangkat Daerah dan Kecamatan di Wilayah Kerja Irban I	Memastikan Penyerapan APBD Perangkat Daerah pada Semester II Tahun 2025 sesuai dengan RAK	Minggu ke-3 Desember 2025	Minggu ke-4 Desember 2025	0	0	1	1	9	11	8.580.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah I
15	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP	TLHP BPK dan TLHP APIP	Monitoring TLHP BPK dan TLHP APIP pada Wilayah Kerja Irban I dan Kecamatan Adiankoting, Siborong dan Pangaribuan	Mengetahui sejauhmana TLHP Semester II Tahun 2025 telah diselesaikan oleh Objek yang diperiksa	Minggu ke-2 Desember 2025	Minggu ke-3 Desember 2025	0	0	1	1	9	11	9.240.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah I
16	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penutupan Buku Kas	Perangkat Daerah dan Kecamatan di Wilayah Kerja Irban I	Memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh PD telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan telah sesuai untuk dilakukan penutupan kas	Minggu ke-4 Desember s/d Minggu ke-5 Desember 2025	Minggu ke-5 Desember 2025	0	0	1	1	9	11	-	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah I
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II																	
1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Monitoring Disiplin ASN Awal Tahun 2025	Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan Wilayah Kerja Irban II	Megetahui tingkat kehadiran sebagai bentuk disiplin ASN pada awal Tahun 2025	Minggu ke-1 Januari 2025	Minggu ke-2 Januari 2025	0	0	1	1	9	11	4.290.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan, Kenderaan	Manajemen Pimpinan	Irban Wilayah II
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban II (Dinas PMD, BKPSDM, Dinas PERKIM, Dinas DUKCATPIL, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PPKBP3A, Kecamatan Siatas Barita, Muara dan Simangumban)	Melakukan Penutupan Buku Kas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-2 Januari 2025	Minggu ke-3 Januari 2025	1	1	1	1	9	11	4.290.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	3,36 (Tinggi)	Irban Wilayah II
3	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Khusus	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memastikan pengaduan masyarakat tertangani dengan baik	Minggu ke-2 Januari 2025	Minggu ke-3 Januari 2025	0	0	1	1	9	11	3.960.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	3,36 (Tinggi)	Irban Wilayah II
4	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Dana BOS	SD dan SMP di Kecamatan Siatas Barita	Memastikan Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis	Minggu ke-3 Januari s/d Minggu Ke-5 Februari 2025	Minggu ke-1 Pebruari 2025	0	0	1	1	9	11	19.800.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah II
			SD dan SMP di Kecamatan Muara	Memastikan Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis	Minggu ke-1 Pebruari s/d Minggu ke-3 Pebruari 2025	Minggu ke-4 Februari 2025	0	0	1	1	9	11	27.720.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah II
			SD dan SMP di Kecamatan Simangumban	Memastikan Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis	Minggu ke-4 Februari s/d Minggu Ke-2 Maret 2025	Minggu ke-3 Maret 2025	0	0	1	1	9	11	27.720.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah II
5	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan BOS	SD dan SMP di Kecamatan Muara, Siatas Barita dan Simangumban	Memastikan Pencairan Dana BOS Tahun 2025 sesuai dengan Petunjuk Teknis	Minggu ke-3 Maret s/d Minggu ke-4 Maret 2025	Minggu ke-1 April 2025	0	0	1	1	9	11	15.400.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah II
6	Pengawasan Desa	Pemeriksaan Keuangan Desa	Pengelolaan Anggaran Desa (DD/ADD) Tahun 2024 Kecamatan Siatas Barita	Mengetahui sejauh mana pengelolaan Keuangan DD/ADD Tahun Anggaran 2024	Minggu ke-1 April s/d Minggu ke-3 April 2025	Minggu ke-4 April 2025	0	0	1	1	9	11	19.800.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah II
			Pengelolaan Anggaran Desa (DD/ADD) Tahun 2024 Kecamatan Muara	Mengetahui sejauh mana pengelolaan Keuangan DD/ADD Tahun Anggaran 2024	Minggu ke-4 April 2025 s/d Minggu Ke-2 Mei 2025	Minggu ke-3 Mei 2025	0	0	1	1	9	11	23.100.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah II

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Pengampu
					RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pengelolaan Anggaran Desa (DD/ADD) Tahun 2024 Kecamatan Simangumban	Mengetahui sejauh mana pengelolaan Keuangan DD/ADD Tahun Anggaran 2024	Minggu ke-3 Mei 2025 s/d Minggu Ke-1 Juni 2025	Minggu ke-2 Juni 2025	0	0	1	1	9	11	20.020.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah II
7	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	Dinas DUKCATPIL	Pemeriksaan Pelaksanaan NSPK Dinas Dukcatpil dan kinerja pelayanan publik pencatatan Kependudukan di 15 Kecamatan	Minggu ke-2 Juni s/d Minggu ke-3 Juni 2025	Minggu ke-4 Juni 2025	0	0	1	1	9	11	16.940.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	3,22 (Tinggi)	Irban Wilayah II
8	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan SPM	Dinas Perkim	Pemeriksaan SPM Dinas Perkim dan kinerja Dinas Perkim di 15 Kecamatan	Minggu ke-4 Juni s/d Minggu ke-5 Juni 2025	Minggu ke-1 Juli 2025	0	0	1	1	9	11	15.400.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	3,12 (Tinggi)	Irban Wilayah II
9	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Monitoring Penyerapan APBD	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban II	Mengetahui sejauh mana realisasi penyerapan anggaran semester I Tahun 2025 dan mengetahui penyebab dan akibat	Minggu ke-1 Juli 2025	Minggu ke-2 Juli 2025	0	0	1	1	9	11	9.240.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah II
10	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP	TLHP BPK dan TLHP APIP	Monitoring TLHP APIP dan BPK pada Wilayah Kerja Irban II dan Kecamatan Siatas Barita, Muara dan Simangumban	Mengetahui sejauhmana TLHP Semester I Tahun 2025 yang telah diselesaikan oleh Objek Pemeriksaan	Minggu ke-2 Juli 2025	Minggu ke-3 Juli 2025	0	0	1	1	9	11	9.240.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah II
11	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	Pemeriksaan Fisik pada Dinas Perkim	Memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari DAK/DAU Fisik dan Non Fisik pada Dinas Perkim	Minggu ke-3 Juli s/d Minggu ke-2 Agustus 2025	Minggu ke-3 Agustus 2025	0	0	1	1	9	11	33.880.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah II
12	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	Dinas KB - Program Stunting	Memastikan Kinerja Program Stunting pada Dinas KB telah sesuai dengan prinsip 3E (Ekonomis, Efektif dan Efisien)	Minggu 3 Agustus 2025 s/d Minggu ke-2 September 2025	Minggu ke-3 September 2025	0	0	1	1	9	11	36.960.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Tinggi	Irban Wilayah II
13	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	Pemeriksaan atas Belanja Dana JKN dan BOK UPT Kecamatan Muara, Simangumban dan Siatas Barita TA 2024	Memastikan pemeriksaan Belanja Dana JKN dan BOK UPT Kecamatan Muara, Simangumban dan Siatas Barita TA 2024 terlaksana dengan baik	Minggu 3 September s/d Minggu ke-5 September 2025	Minggu ke-1 Oktober 2025	0	0	1	1	9	11	27.720.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah II
14	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengaduan Khusus	Pemeriksaan Khusus terhadap Objek di Wilayah Kerja Irban II dan Perseroda	Memastikan pemeriksaan terhadap Objek di Wilayah Kerja Irban II dan Perseroda terlaksana dengan baik	Minggu 1 Oktober s/d Minggu ke-4 Oktober 2025	Minggu ke-1 Nopember 2025	0	0	1	1	9	11	36.960.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah II
15	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	Pengawasan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Lingkungan Hidup	Memastikan realisasi Pendapatan Asli Daerah tercapai	Minggu ke-1 Nopember s/d Minggu ke-2 Nopember 2025	Minggu ke-3 Nopember 2025	0	0	1	1	9	11	17.160.000	1 LHP	ATK, Laptop	3,36 (Tinggi)	Irban Wilayah II
16	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Khusus	Sertijab, Dumas	Memastikan pelaksaaan sertijab dan dumas terlaksana dengan baik	Minggu ke-3 Nopember s/d Minggu ke-4 Nopember 2025	Minggu ke-1 Desember 2025	0	0	1	1	9	11	17.160.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah II
17	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP	TLHP BPK dan TLHP APIP	Monitoring TLHP APIP dan BPK pada Wilayah Kerja Irban II dan Kecamatan Siatas Barita, Muara dan Simangumban	Mengetahui sejauhmana TLHP Semester II Tahun 2025 yang telah diselesaikan oleh Objek Pemeriksaan	Minggu ke-1 Desember 2025	Minggu ke-2 Desember 2025	0	0	1	1	9	11	9.240.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah II
18	Pengawasan Desa	Pemeriksaan Keuangan Desa	Monitoring Penggunaan Keuangan Desa Kecamatan Muara, Siatas Barita dan Simangumban TA 2025	Memastikan penggunaan keuangan desa terlaksana dengan baik	Minggu ke-2 Desember s/d Minggu ke-3 Desember 2025	Minggu ke-4 Oktober 2025	0	0	1	1	9	11	18.480.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah II
19	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penutupan Buku Kas	Perangkat Daerah dan Kecamatan di Wilayah Kerja Irban II	Memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh PD telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan telah sesuai untuk dilakukan penutupan kas	Minggu ke-4 Desember s/d Minggu ke-5 Desember 2025	Minggu ke-4 Desember 2025	0	0	1	1	9	11	-	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah II

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Pengampu
					RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III																	
1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Monitoring Disiplin ASN Awal Tahun 2025	Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan Wilayah Kerja Irban	Megetahui tingkat kehadiran sebagai bentuk disiplin ASN pada awal Tahun Anggaran 2024	Minggu ke-1 Januari 2025	Minggu ke-2 Januari 2025	0	0	1	1	8	10	3.900.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan, Kendaraan	Manajemen Pimpinan	Irban III
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Penutupan Buku Kas Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban III	Melakukan Penutupan Buku Kas Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Wilayah Kerja Irban III	Minggu ke-2 Januari 2025	Minggu ke-2 Januari 2025	0	0	1	1	8	10	3.900.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan, Kendaraan	Manajemen Pimpinan	Irban III
3	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban III (Dinas Pendidikan, Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dan Kecamatan Sipahutar)	Memastikan Bendahara,KPA/PA/ PPK/PPTK Perangkat Daerah melakukan pengelolaan kas, Aset, surat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-2 Januari 2025	Minggu ke-3 Januari 2025	0	0	1	1	8	10	3.900.000	1 LHP	ATK, Laptop	3,36 (Tingg)	Irban III
4	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban III (BKAD, Satpol PP dan Kecamatan Sipoholon)	Memastikan Bendahara,KPA/PA/ PPK/PPTK Perangkat Daerah melakukan pengelolaan kas, Aset, surat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-3 Januari 2025	Minggu ke-3 Januari 2025	0	0	1	1	8	10	3.600.000	1 LHP	ATK, Laptop	3,36 (Tingg)	Irban III
5	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban III (Dinas Sosial, Pariwisata dan Kecamatan Purbatua)	Memastikan Bendahara,KPA/PA/ PPK/PPTK Perangkat Daerah melakukan pengelolaan kas, Aset, surat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-3 Januari 2025	Minggu ke-4 Januari 2025	1	1	1	1	8	12	5.040.000	1 LHP	ATK, Laptop	3,36 (Tingg)	Irban III
6	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan SPM	Pemenuhan bukti/dokumen Pelaksana SPM Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Perkim, PUTR dan Satpol PP di Kecamatan Garoga, Muara dan Siatas Barita (Sampel)	Pengujian dan memastikan Perangkat Daerah Pelaksana SPM memenuhi pemenuhan Capaian SPM dengan bukti yang sah, valid dan sesuai dengan Regulasi Kebijakan	Minggu ke-4 Januari 2025	Minggu ke-5 Januari 2025	0	0	1	1	8	12	9.720.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/Manajemen	Irban III
7	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan SPM	Pemenuhan bukti/dokumen Pelaksana SPM Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Perkim, PUTR dan Satpol PP di Kecamatan Pahae Jae, Pagaran dan Tarutung (Sampel)	Memastikan Perangkat Daerah Pelaksana SPM memenuhi pemenuhan Capaian SPM dengan bukti yang sah, valid dan sesuai dengan Regulasi Kebijakan	Minggu ke-5 Januari 2025	Minggu ke-1 Pebruari 2025	0	0	1	1	8	12	4.680.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/Manajemen	Irban III
8	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Belanja Modal/Fisik	Melakukan pemeriksaan terhadap Belanja Modal yang Bersumber dari DAK/DAU Fisik dan Non Fisik TA. 2024 pada Dinas Pendidikan	Memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari DAK/DAU Fisik dan Non Fisik pada Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-1 Pebruari s/d Minggu ke-4 Pebruari 2025	Minggu ke-1 Maret 2025	0	0	1	1	8	10	31.200.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	3,36 (Tingg)	Irban III
9	Pengawasan Desa	Pemeriksaan Keuangan Desa	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 pada 13 Desa di Kecamatan Sipoholon	Memastikan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (ADD dan DD) Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-1 Maret s/d Minggu ke-2 Maret 2025	Minggu ke-3 Maret 2025	0	0	1	1	8	10	14.400.000	1 LHP	ATK, Laptop, Peraturan, Alat Ukur	Tinggi	Irban III
10	Pengawasan Desa	Pemeriksaan Keuangan Desa	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 pada 26 Desa di Kecamatan Sipahutar	Memastikan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (ADD dan DD) Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-3 Maret s/d Minggu ke-2 April 2025	Minggu ke-3 April 2025	0	0	1	1	8	10	24.700.000	1 LHP	ATK, Laptop, Peraturan, Alat Ukur	Tinggi	Irban III
11	Pengawasan Desa	Pemeriksaan Keuangan Desa	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 pada 13 Desa di Kecamatan Purbatua	Memastikan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (ADD dan DD) Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-3 April s/d Minggu ke-4 April 2025	Minggu ke-1 Mei 2025	1	1	1	1	8	12	18.480.000	1 LHP	ATK, Laptop, Peraturan, Alat Ukur	Tinggi	Irban III

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Pengampu
					RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Dana BOS	SD dan SMP di Kecamatan Sipahutar	Memastikan Pengelolaan Dana BOS Tahun 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis	Minggu ke-1 Mei s/d Minggu ke-3 Mei 2025	Minggu ke-4 Mei 2025	0	0	1	1	8	10	20.800.000	1 LHP	ATK, Laptop	2,96 (Tinggi)	Irban III
		Pemeriksaan Dana BOS	SD dan SMP di Kecamatan Purbatua		Minggu ke-4 Mei s/d Minggu ke-1 Juni 2025	Minggu ke-2 Juni 2025	1	1	1	1	8	12	11.760.000	1 LHP	ATK, Laptop	2,96 (Tinggi)	Irban III
		Pemeriksaan Dana BOS	SD dan SMP di Kecamatan Sipoholon		Minggu ke-2 Juni 2025	Minggu ke-3 Juni 2025	0	0	1	1	8	10	6.000.000	1 LHP	ATK, Laptop	2,96 (Tinggi)	Irban III
13	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Belanja Modal/Fisik	Melakukan pemeriksaan terhadap Belanja Modal yang Bersumber dari DAK/DAU Fisik dan Non Fisik TA. 2024 pada Dinas Pariwisata	Memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari DAK/DAU Fisik dan Non Fisik pada Dinas Pariwisata sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-3 Juni 2025	Minggu ke-4 Juni 2025	0	0	1	1	8	10	7.800.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	3,36 (Tinggi)	Irban III
14	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Kecamatan Sipoholon Tahun 2025	Menilai Kecukupan atas kinerja dengan orientasi Ekonomis, Efisien dan Efektif (3E)	Minggu ke-4 Juni 2025	Minggu ke-5 Juni 2025	0	0	1	1	8	5	3.600.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan, Kendaraan	3,22 (Tinggi)	Irban III
15	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Kecamatan Sipahutar Tahun 2025	Menilai Kecukupan atas kinerja dengan orientasi Ekonomis, Efisien dan Efektif (3E)	Minggu ke-5 Juni 2025	Minggu ke-1 Juli 2025	0	0	1	1	8	5	3.900.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan, Kendaraan	3,22 (Tinggi)	Irban III
16	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Kecamatan Purbatua Tahun 2025	Menilai Kecukupan atas kinerja dengan orientasi Ekonomis, Efisien dan Efektif (3E)	Minggu ke-1 Juli 2025	Minggu ke-2 Juli 2025	1	1	1	1	8	6	5.040.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan, Kendaraan	3,22 (Tinggi)	Irban III
17	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Monitoring Penyerapan APBD	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban III (Kecamatan Sipahutar, Sipoholon dan Purbatua)	Mengetahui sejauhmana realisasi penyerapan anggaran semester I Tahun 2025 terhadap Rencana Anggaran Kas dan mengetahui penyebab dan akibat dan memberikan saran perbaikan atas kekurangan yang dijumpai	Minggu ke-2 Juli 2025	Minggu ke-3 Juli 2025	0	0	1	1	8	11	8.580.000	1 LHP	ATK, Laptop	Manajemen	Irban III
18	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP	TLHP BPK dan TLHP APIP	Monitoring TLHP BPK dan TLHP APIP pada Wilayah Kerja Irban III dan Kecamatan Sipahutar, Sipoholon dan Purbatua	Mengetahui sejauhmana TLHP Semester I Tahun 2025 telah diselesaikan oleh Objek yang diperiksa	Minggu ke-3 Juli 2025	Minggu ke-4 Juli 2025	0	0	1	1	8	10	7.800.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Manajemen	Irban III
19	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Ketaatan	UPT Puskesmas Situmeang Habinsaran dan Sitadatada Kecamatan Sipoholon	Menilai kecukupan atas Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan	Minggu ke-4 Juli s/d Minggu ke-1 Agustus 2025	Minggu ke-2 Agustus 2025	0	0	1	1	8	12	17.280.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan, Kendaraan	3,12 (Tinggi)	Irban III
20	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Ketaatan	UPT Puskesmas Kecamatan Sipahutar	Menilai kecukupan atas Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan	Minggu ke-2 Agustus 2025	Minggu ke-3 Agustus 2025	0	0	1	1	8	6	4.680.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan, Kendaraan	3,12 (Tinggi)	Irban III
21	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Ketaatan	UPT Puskesmas Kecamatan Purbatua	Menilai kecukupan atas Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan	Minggu ke-3 Agustus 2025	Minggu ke-4 Agustus 2025	1	1	1	1	8	6	5.040.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan, Kendaraan	3,12 (Tinggi)	Irban III
22	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	Penguji Kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kecamatan	Menilai Kecukupan atas kinerja dengan orientasi Ekonomis, Efisien dan Efektif (3E)	Minggu ke-4 Agustus 2025	Minggu ke-1 September 2025	0	0	1	1	8	12	9.360.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan, Kendaraan	2,82 (Sedang)	Irban III
23	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Belanja Modal/Fisik	Monitoring Belanja Modal Tahun 2025 Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban III di Kecamatan	Mengetahui sejauhmana dokumen pertanggungjawaban belanja terhadap Rencana Anggaran Kas Tahun Berjalan 2025	Minggu ke-1 September s/d Minggu ke-4	Minggu ke-5 September 2025	1	1	1	1	8	12	34.320.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Tinggi	Irban III
24	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Tahun 2025	Pemeriksaan PNPB Tahun 2025 Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban III	Mengetahui sejauhmana capaian PNPB TA 2025 terhadap Target yang ditetapkan dan mengetahui hambatan/permasalahan serta memberikan saran atas permasalahan yang ada	Minggu ke-5 September 2025	Minggu ke-1 Oktober 2025	0	0	1	1	8	6	4.680.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Manajemen	Irban III

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Pengampu
					RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan SPM	Pemenuhan bukti/dokumen Pelaksana SPM Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Perkim, PUTR dan Satpol PP di Kecamatan Garoga, Muara dan Siatas Barita (Sampel)	Pengujian dan memastikan Perangkat Daerah Pelaksana SPM memenuhi pemenuhan Capaian SPM dengan bukti yang sah, valid dan sesuai dengan Regulasi Kebijakan	Minggu ke-1 Oktober s/d Minggu ke-2 Oktober 2025	Minggu ke-3 Oktober 2025	0	0	1	1	8	6	9.360.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Manajemen	Irban III
26	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan SPM	Pemenuhan bukti/dokumen Pelaksana SPM Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Perkim, PUTR dan Satpol PP di Kecamatan Pahae Jae, Pagaran dan Tarutung (Sampel)	Memastikan Perangkat Daerah Pelaksana SPM memenuhi pemenuhan Capaian SPM dengan bukti yang sah, valid dan sesuai dengan Regulasi Kebijakan	Minggu ke-3 Oktober s/d Minggu ke-4 Oktober 2025	Minggu ke-1 Nopember 2025	0	0	1	1	8	6	9.360.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Manajemen	Irban III
27	Pengawasan Desa	Pemeriksaan Keuangan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa (DD/ADD) Tahun 2025 Kecamatan Sipahutar	Mengetahui sejauhmana pengelolaan dana desa dan ADD Tahun 2025	Minggu ke-1 Nopember s/d Minggu ke-2 Nopember 2025	Minggu ke-3 Nopember 2025	0	0	1	1	8	10	15.600.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Tinggi	Irban III
28	Pengawasan Desa	Pemeriksaan Keuangan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa (DD/ADD) Tahun 2025 Kecamatan Sipoholon	Mengetahui sejauhmana pengelolaan dana desa dan ADD Tahun 2025	Minggu ke-3 Nopember 2025	Minggu ke-4 Nopember 2025	0	0	1	1	8	10	7.200.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Tinggi	Irban III
29	Pengawasan Desa	Pemeriksaan Keuangan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa (DD/ADD) Tahun 2025 Kecamatan Purbatua	Mengetahui sejauhmana pengelolaan dana desa dan ADD Tahun 2025	Minggu ke-4 Nopember 2025	Minggu ke-1 Desember 2025	0	0	1	1	8	10	8.400.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Tinggi	Irban III
30	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Monitoring Penyerapan APBD	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban III (Kecamatan Sipahutar, Sipoholon dan Purbatua)	Mengetahui sejauhmana realisasi penyerapan anggaran semester II Tahun 2025 terhadap Rencana Anggaran Kas dan mengetahui penyebab dan akibat dan memberikan saran perbaikan atas kekurangan yang dijumpai	Minggu ke-1 Desember 2025	Minggu ke-2 Desember 2025	0	0	1	1	8	11	8.580.000	1 LHP	ATK, Laptop	Manajemen	Irban III
31	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP	TLHP BPK dan TLHP APIP	Monitoring TLHP BPK dan TLHP APIP pada Wilayah Kerja Irban III dan Kecamatan Sipahutar, Sipoholon dan Purbatua	Mengetahui sejauhmana TLHP Semester II Tahun 2025 telah diselesaikan oleh Objek yang diperiksa	Minggu ke-2 Desember s/d Minggu ke-3 2025	Minggu ke-4 Desember 2025	0	0	1	1	8	10	15.600.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Manajemen	Irban III
32	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penutupan Buku Kas	Perangkat Daerah dan Kecamatan di Wilayah Kerja Irban III	Memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh PD telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan telah sesuai untuk dilakukan penutupan kas	Minggu ke-4 Desember s/d Minggu ke-5 Desember 2025	Minggu ke-5 Desember 2025	0	0	1	1	8	10	-	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Manajemen	Irban III
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV																	
1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Monitoring Disiplin ASN Awal Tahun 2025	Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan Wilayah Kerja Irban IV	Megetahui tingkat kehadiran sebagai bentuk disiplin ASN pada awal Tahun 2025	Minggu ke-1 Januari 2025	Minggu ke-2 Januari 2025	0	0	1	1	9	11	4.290.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan, Kendaraan	Manajemen Pimpinan	Irban Wilayah IV
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban IV	Melakukan Audit Opname Cash Tahun Anggaran 2024	Minggu ke-2 Januari 2025	Minggu ke-2 Januari 2025	0	0	1	1	9	11	4.290.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Mandatory/ Manajemen	Irban Wilayah IV
3	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban IV (Kecamatan Tarutung, Pahae Julu dan Garoga)	Melakukan Audit Keuangan atas Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2024	Minggu ke-2 Januari s/d Minggu ke-3 Januari 2025	Minggu ke-4 Januari 2025	0	0	1	1	9	11	12.870.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/ Manajemen	Irban Wilayah IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Pengampu
					RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Pengadaan Barang	Perangkat Daerah PUTR, Ketapang, Perindag, RSUD)	Melakukan Audit Belanja Modal/Fisik TA. 2024	Minggu ke-4 Januari s/d	Minggu ke-4 Februari 2025	1	1	1	1	9	11	38.610.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	3,36 (Tinggi)	Irban Wilayah IV
5	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Ketaatan	UPT Kesehatan Wilayah Kerja Irban IV	Menilai Kepatuhan dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Minggu ke-4 Februari s/d Minggu ke-2 Maret 2025	Minggu ke-3 Maret 2025	0	0	1	1	9	11	25.740.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/Manajemen	Irban Wilayah IV
6	Pengawasan Desa	Pemeriksaan Keuangan Desa	Pengelolaan Keuangan Dana Desa/Alokasi Dana Desa TA. 2024 pada Kecamatan Tarutung, Pahae Julu dan Garoga	Mengetahui sejauh mana pengelolaan Keuangan DD/ADD Tahun Anggaran 2024	Minggu ke-3 Maret s/d Minggu ke-4 April 2025	Minggu ke-1 Mei 2025	0	0	1	1	9	11	42.900.000	3 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/Manajemen	Irban Wilayah IV
7	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Dana BOS	SD dan SMP di Kecamatan Tarutung, Pahae Julu dan Garoga	Memastikan Pengelolaan Dana BOS TA. 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis	Minggu ke-1 Mei s/d Minggu ke-2 Juni 2025	Minggu ke-3 Juni 2025	0	0	1	1	9	11	40.040.000	3 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/Manajemen	Irban Wilayah IV
8	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP	TLHP BPK dan TLHP APIP	Monitoring TLHP BPK dan TLHP APIP pada Wilayah Kerja Irban IV dan Kecamatan Tarutung, Pahae Julu dan Garoga	Mengetahui sejauhmana TLHP Semester I Tahun 2025 yang telah diselesaikan oleh Objek Pemeriksaan	Minggu ke-3 Juni s/d Minggu ke-4 Juni 2025	Minggu ke-5 Juni 2025	0	0	1	1	9	11	14.300.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah IV
9	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Monitoring Penyerapan APBD	Perangkat Daerah dan Kecamatan Wilayah Kerja Irban IV	Menilai Sejauhmana Penyerapan Anggaran Semester I TA. 2025 pada Perangkat Daerah sesuai dengan DPA.	Minggu ke-2 Juni s/d Minggu ke-1 Juli 2025	Minggu ke-2 Juli 2025	0	0	1	1	9	11	17.160.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/Manajemen	Irban Wilayah IV
10	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Kecamatan Wilayah Kerja Irban IV	Memastikan Kinerja Perangkat Daerah terlaksana sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-2 Juli s/d Minggu ke-4 Juli 2025	Minggu ke-1 Agustus 2025	0	0	1	1	9	11	25.740.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah IV
11	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Keuangan	UPT Pasar	Menilai Kepatuhan dan Ketaatan Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban IV Semester I Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Minggu ke-1 Agustus s/d Minggu ke-3 Agustus 2025	Minggu ke-4 Agustus 2025	0	0	1	1	9	11	25.740.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah IV
12	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Keuangan	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban IV	Menilai Kepatuhan dan Ketaatan Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban Khusus Semester I sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Minggu ke-4 Agustus s/d Minggu ke-2 September 2025	Minggu ke-3 September 2025	0	0	1	1	9	11	22.880.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah IV
13	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Dana BOS	SD dan SMP di Kecamatan Tarutung, Pahae Julu dan Garoga	Memastikan Pengelolaan Dana BOS TA. 2025 sesuai dengan Petunjuk Teknis	Minggu ke-3 September s/d Minggu ke-2 Oktober 2025	Minggu ke-3 Oktober 2025	0	0	1	1	9	11	42.900.000	3 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/Manajemen	Irban Wilayah IV
14	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban IV	Monitoring Pemeriksaan Fisik Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2025	Minggu ke-3 September s/d Minggu ke-1 Nopember 2025	Minggu ke-2 Nopember 2025	0	0	1	1	9	11	25.740.000	3 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/Manajemen	Irban Wilayah IV
15	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Monitoring dan Evaluasi Dana Kelurahan Tahun 2025	Kecamatan Tarutung, Pahae Julu dan Garoga	Memastikan Monitoring dan Evaluasi Dana Kelurahan TA. 2025	Minggu ke-2 Nopember s/d Minggu ke-3 Nopember 2025	Minggu ke-4 Nopember 2025	0	0	1	1	9	11	17.160.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/Manajemen	Irban Wilayah IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Pengampu
					RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Pengawasan Desa	Pemeriksaan Keuangan Desa	Pengelolaan Keuangan Dana Desa/Alokasi Dana Desa TA. 2025 pada Kecamatan Tarutung, Pahae Julu dan Garoga	Mengetahui sejauh mana pengelolaan Keuangan DD/ADD Tahun Anggaran 2025	Minggu ke-4 Nopember s/d Minggu ke-1 Desember 2025	Minggu ke-2 Desember 2025	0	0	1	1	9	11	17.160.000	3 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/ Manajemen	Irban Wilayah IV
17	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP	TLHP BPK dan TLHP APIP	Monitoring TLHP BPK dan TLHP APIP pada Wilayah Kerja Irban IV dan Kecamatan Kecamatan Tarutung, Pahae Julu dan Garoga	Mengetahui sejauhmana TLHP Semester II Tahun 2025 yang telah diselesaikan oleh Objek	Minggu ke-2 Deember s/d Minggu ke-3 Desember 2025	Minggu ke-4 Desember 2025	0	0	1	1	9	11	17.160.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Wilayah IV
18	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penutupan Buku Kas	Perangkat Daerah dan Kecamatan di Wilayah Kerja Irban IV	Memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh PD telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan telah sesuai untuk dilakukan penutupan kas	Minggu ke-4 Desember s/d Minggu ke-5 Desember 2025	Minggu ke-5 Desember 2025	0	0	1	1	9	11	-	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/ Manajemen	Irban Wilayah IV
INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS																	
1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Monitoring Disiplin ASN Awal Tahun 2025	Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan Wilayah Kerja Irban Khusus	Megetahui tingkat kehadiran sebagai bentuk disiplin ASN pada awal Tahun 2025	Minggu ke-1 Januari 2025	Minggu ke-2 Januari 2025	0	0	1	1	9	11	4.290.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan, Kenderaan	Manajemen Pimpinan	Irban Khusus
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban Khusus	Melakukan Penutupan Buku Kas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-2 Januari 2025	Minggu ke-2 Januari 2025	0	0	1	1	9	11	4.290.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	3,36 (Tinggi)	Irban Khusus
3	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban Khusus (Kecamatan Pahae Jae, Pagaran dan Parmonangan)	Melakukan Audit Keuangan atas Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2024	Minggu ke-2 Januari s/d Minggu ke-3 Januari 2025	Minggu ke-4 Januari 2025	0	0	1	1	9	11	12.870.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/ Manajemen	Irban Khusus
4	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Belanja Modal/Fisik	Perangkat Daerah (BPBD, Dinas Ketenagakerjaan, Kesbangpol, Perpustakaan, PO)	Melakukan Audit Belanja Modal/Fisik TA. 2024	Minggu ke-4 Januari s/d Minggu ke-3 Pebruari 2025	Minggu ke-4 Pebruari 2025	0	0	1	1	9	11	38.610.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/ Manajemen	Irban Khusus
5	Pengawasan Desa	Pemeriksaan Keuangan Desa	Pengelolaan Keuangan Dana Desa/Alokasi Dana Desa TA. 2024 pada Kecamatan Pahae Jae, Pagaran dan Parmonangan	Mengetahui sejauh mana pengelolaan Keuangan DD/ADD Tahun Anggaran 2024	Minggu ke-4 Pebruari s/d Minggu ke-2 April 2025	Minggu ke-3 April 2025	0	0	1	1	9	11	52.910.000	3 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/ Manajemen	Irban Khusus
6	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Dana BOS	SD dan SMP di Kecamatan Pahae Jae, Pagaran dan Parmonangan	Memastikan Pengelolaan Dana BOS TA. 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis	Minggu ke-3 April s/d Minggu ke-3 Mei 2025	Minggu ke-4 Mei 2025	0	0	1	1	9	11	38.610.000	3 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/ Manajemen	Irban Khusus
7	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Dana Kelurahan	Kelurahan di Kecamatan Pahae Jae	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Kelurahan	Minggu ke-4 Mei 2025	Minggu ke-1 Juni 2025	0	0	1	1	9	11	4.290.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/ Manajemen	Irban Khusus
8	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Ketaatan	UPT Kecamatan	Menilai Kepatuhan dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Minggu ke-1 Juni s/d Minggu ke-5 Juni 2025	Minggu ke-1 Juli 2025	0	0	1	1	9	11	35.750.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/ Manajemen	Irban Khusus

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Pengampu
					RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Monitoring Penyerapan APBD	Perangkat Daerah dan Kecamatan Wilayah Kerja Irban Khusus	Menilai Sejahterama Penyerapan Anggaran Semester I TA. 2025 pada Perangkat Daerah sesuai dengan DPA.	Minggu ke-1 Juli 2025	Minggu ke-2 Juli 2025	0	0	1	1	9	11	8.580.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/Manajemen	Irban Khusus
10	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP	TLHP BPK dan TLHP APIP	Monitoring TLHP BPK dan TLHP APIP pada Wilayah Kerja Irban Khusus dan Kecamatan Kecamatan Pahae Jae, Pagaran dan Parmonangan	Mengetahui sejauhmana TLHP Semester I Tahun 2025 yang telah diselesaikan oleh Objek	Minggu ke-2 Juli s/d Minggu ke-3 Juli 2025	Minggu ke-4 Juli 2025	0	0	1	1	9	11	17.160.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Khusus
11	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Belanja Modal/Fisik	Monitoring Belanja Modal Tahun 2025 Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban Khusus di Kecamatan	Mengetahui sejauhmana dokumen pertanggungjawaban belanja terhadap Rencana Anggaran Kas Tahun Berjalan 2025	Minggu ke-4 Juli s/d Minggu ke-1 Agustus 2025	Minggu ke-2 Agustus 2025	1	1	1	1	8	12	18.720.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Tinggi	Irban Khusus
12	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban Khusus (Kecamatan Pahae Jae, Pagaran, Parmonangan dan BPBD)	Memastikan Kinerja Perangkat Daerah terlaksana sesuai dengan ketentuan	Minggu ke-2 Agustus s/d Minggu ke-1 September 2025	Minggu ke-2 September 2025	0	0	1	1	9	11	31.460.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Khusus
13	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Keuangan	Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban Khusus	Menilai Kepatuhan dan Ketaatan Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban Khusus Semester I sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Minggu ke-2 September s/d Minggu ke-5 September 2025	Minggu ke-1 Oktober 2025	0	0	1	1	9	11	34.320.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/Manajemen	Irban Khusus
14	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Dana BOS	SD dan SMP di Kecamatan Pahae Jae, Pagaran dan Parmonangan	Memastikan Pengelolaan Dana BOS Triwulan I s/d Triwulan III TA. 2025 sesuai dengan Petunjuk Teknis	Minggu ke-1 Oktober s/d Minggu ke-4 Oktober 2025	Minggu ke-1 Nopember 2025	0	0	1	1	9	11	34.320.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/Manajemen	Irban Khusus
15	Pengawasan Desa	Pemeriksaan Keuangan Desa	Kecamatan Pahae Jae, Pagaran dan Parmonangan	Monitoring dan Evaluasi DD/ADD Tahun 2025	Minggu ke-1 Nopember s/d Minggu ke-4 Nopember 2025	Minggu ke-1 Desember 2025	0	0	1	1	9	11	34.320.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/Manajemen	Irban Khusus
16	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Monitoring Penyerapan APBD	Perangkat Daerah dan Kecamatan Wilayah Kerja Irban Khusus	Menilai Sejahterama Penyerapan Anggaran Semester I TA. 2025 pada Perangkat Daerah sesuai dengan DPA.	Minggu ke-1 Desember 2025	Minggu ke-2 Desember 2025	0	0	1	1	9	11	8.580.000	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/Manajemen	Irban Khusus
17	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP	TLHP BPK dan TLHP APIP	Monitoring TLHP BPK dan TLHP APIP pada Wilayah Kerja Irban Khusus dan Kecamatan Kecamatan Pahae Jae, Pagaran dan Parmonangan	Mengetahui sejauhmana TLHP Semester II Tahun 2025 yang telah diselesaikan oleh Objek	Minggu ke-2 Desember s/d Minggu ke-3 Desember 2025	Minggu ke-4 Desember 2025	0	0	1	1	9	11	17.160.000	1 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Khusus
18	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penutupan Buku Kas	Perangkat Daerah dan Kecamatan di Wilayah Kerja Irban Khusus	Memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh PD telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan telah sesuai untuk dilakukan penutupan kas	Minggu ke-4 Desember s/d Minggu ke-5 Desember 2025	Minggu ke-5 Desember 2025	0	0	1	1	9	11	-	1 LHP	Laptop, Regulasi Kebijakan	Mandatory/Manajemen	Irban Khusus
19	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Investigatif	Penanganan Pengaduan Berasal dari APH dan Masyarakat	Membuktikan pengaduan pada kejadian yang ada dilapangan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Bulan Januari s/d Desember 2025	Bulan Januari s/d Desember 2025	0	0	1	1	9	11	171.600.000	20 LHP	Laptop, ATK, dan Printer	Manajemen	Irban Khusus

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Pengampu
					RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA													2.201.464.000				
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL													670.342.900				
1	Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Reviu RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah	Menilai sejauhmana kesesuaian penyajian RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah	Memastikan Kesesuaian Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2030 dan RENSTRA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Bulan April s/d Mei 2025	Bulan April s/d Mei 2025	1	1	1	1	6	10	4.100.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN IV
							0	0	1	1	12	14	42.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu RKPD Murni	Menilai sejauhmana kesesuaian penyajian RPJMD dan RENSTRA dengan RKPD	Memastikan Kesesuaian Penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan	Bulan Mei s/d Juni 2025	Bulan Mei s/d Juni 2025	1	1	1	1	6	10	4.100.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN IV
							0	0	1	1	10	10	30.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu RKPD Perubahan	Menilai sejauhmana kesesuaian penyajian RPJMD dan RENSTRA dengan RKPD Perubahan	Memastikan Kesesuaian Penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan	Bulan Agustus s/d September 2025	Bulan Agustus s/d September 2025	1	1	1	1	6	10	4.100.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN IV
							0	0	1	1	10	10	30.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu RENJA Murni	Menilai sejauhmana kesesuaian penyajian RPJMD, RENSTRA, RKPD dengan RENJA yang akan ditetapkan	Memastikan Kesesuaian Penyusunan RPJMD, RKPD, RENSTRA dengan RENJA yang akan ditetapkan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan	Bulan Agustus s/d September 2025	Bulan Agustus s/d September 2025	1	1	1	1	6	10	4.100.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN IV
							0	0	1	1	10	10	30.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu RENJA Perubahan	Menilai sejauhmana kesesuaian penyajian RPJMD, RENSTRA, RKPD dengan RENJA Perubahan yang akan ditetapkan	Memastikan Kesesuaian Penyusunan RPJMD, RKPD, RENSTRA dengan RENJA Perubahan yang akan ditetapkan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan	Bulan Nopember s/d Desember 2025	Bulan Nopember s/d Desember 2025	1	1	1	1	6	10	4.100.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN IV
							0	0	1	1	10	10	30.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu Benturan Kepentingan	Mengetahui sejauhmana Kebijakan dan implementasi Benturan Kepentingan pada Pemda dan Perangkat Daerah sebagai salah satu indikator RB	Memastikan adanya kebijakan dan penanganan terhadap Benturan Kepentingan pada Pemda dan Perangkat Daerah	1X 1 Tahun	1X 1 Tahun	1	1	1	1	12	16	1.312.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN II
							0	0	1	1	4	6	18.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu Manajemen ASN	Menilai sejauhmana Pelaksanaan manajemen ASN dan tata kelola ASN sesuai dengan Kebijakan yang ada	Mengetahui dan memberikan penilaian Manajemen ASN Tahun 2024 dan Tahun berjalan 2025	1X 1 Tahun	1X 1 Tahun	1	1	1	1	6	10	1.640.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN II
							0	0	1	1	4	7	21.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu SSH, SBU, ASB Dan HASPK Murni	Menilai sejauhmana ketepatan penyajian SSH, SBU, ASB dan HSPK Tahun 2026	Memberikan penilaian terhadap ketepatan SSH, SBU, ASB dan HSPK untuk ditetapkan dan dipergunakan Tahun 2026	Bulan Mei s/d Juni 2025	Bulan Mei s/d Juni 2025	1	1	1	1	26	30	2.460.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN IV
							0	0	1	1	5	7	21.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu SSH, SBU, ASB Dan HASPK Perubahan	Menilai sejauhmana ketepatan penyajian SSH, SBU, ASB dan HSPK Perubahan Tahun 2025	Memberikan penilaian terhadap ketepatan SSH, SBU, ASB dan HSPK Perubahan untuk ditetapkan dan dipergunakan Tahun 2025	Bulan Agustus s/d September 2025	Bulan Agustus s/d September 2025	1	1	1	1	26	30	2.460.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN IV
							0	0	1	1	4	6	18.000.000		Perjalanan Dinas		
2	Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah	Reviu KUA-PPAS Murni	Menilai dan pengujian kesesuaian KUA PPAS Murni Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan ketentuan perencanaan	Melakukan pengujian kesesuaian KUA PPAS Murni tahun 2026 dengan ketentuan perencanaan	Bulan Mei s/d Juni 2025	Bulan Mei s/d Juni 2025	1	1	1	1	4	9	3.690.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN III
							0	0	1	1	4	7	21.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu KUA-PPAS Perubahan	Menilai dan pengujian kesesuaian KUA PPAS Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan ketentuan perencanaan	Melakukan pengujian kesesuaian KUA PPAS Perubahan tahun 2025 dengan ketentuan perencanaan	Bulan Agustus s/d September 2025	Bulan Agustus s/d September 2025	1	1	1	1	4	9	3.690.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN III
							0	0	1	1	4	7	21.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu RKA Murni	Menilai dan pengujian kesesuaian RKA Murni Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan ketentuan perencanaan	Melakukan pengujian kesesuaian RKA Murni tahun 2026 dengan ketentuan perencanaan	Bulan Mei s/d Juni 2025	Bulan Mei s/d Juni 2025	1	1	1	1	4	9	3.690.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN II
							0	0	1	1	4	7	21.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu RKA Perubahan	Menilai dan pengujian kesesuaian RKA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan ketentuan perencanaan	Melakukan pengujian kesesuaian RKA Perubahan tahun 2025 dengan ketentuan perencanaan	Bulan Agustus s/d September 2025	Bulan Agustus s/d September 2025	1	1	1	1	4	9	3.690.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN II
							0	0	1	1	4	7	21.000.000		Perjalanan Dinas		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Pengampu
					RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Reviu Tata Kelola Kepatuhan	Mengetahui dan menilai sejauhmana Tata Kelola Kepatuhan Pengadaan Barang Jasa pada Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Pemda Tahun 2025	Melakukan reviu untuk mengetahui Tata Kelola Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan	1X 1 Tahun	1X 1 Tahun	1	1	1	1	2	6	744.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN III
							0	0	1	1	3	5	15.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu Pengelolaan BMD	Mengetahui Pengelolaan Barang Milik Daerah dari Perencanaan sampai pada penatausahaan	Melakukan reviu untuk memastikan Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah sesuai ditentukan	1X 1 Tahun	1X 1 Tahun	1	1	1	1	2	6	744.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN III
							0	0	1	1	3	5	15.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu Tata Kelola Pajak	Menilai sejauhmana tata kelola pajak	Melakukan reviu untuk memastikan Tata Kelola Pajak sudah sesuai dengan kebijakan yang ada	1X 1 Tahun	1X 1 Tahun	1	1	1	1	2	6	744.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN IV
							0	0	1	1	3	5	15.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu DAK Reguler	Menilai sejauhmana DAK Reguler dikelola dengan baik	Melakukan reviu untuk memastikan DAK Reguler telah dikelola sesuai dengan kebijakan dan ketentuan	1X 1 Tahun	1X 1 Tahun	0	0	0	0	2	2	620.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN III
							0	0	0	3	0	3	9.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu DAK Fisik	Menilai sejauhmana DAK Fisik dikelola dengan baik	Melakukan reviu untuk memastikan DAK Fisik telah dikelola sesuai dengan kebijakan dan ketentuan	1X 1 Tahun	1X 1 Tahun	0	0	0	0	2	2	620.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN III
							0	0	0	3	0	3	9.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu BTT	Menilai sejauhmana Dana BTT dikelola dengan baik	Melakukan reviu untuk memastikan Dana BTT telah dikelola sesuai dengan kebijakan dan ketentuan	1X 1 Tahun	1X 1 Tahun	1	1	1	1	1	5	620.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN III
							0	0	1	1	3	5	15.000.000		Perjalanan Dinas		
3	Reviu Laporan Kinerja	Reviu LPPD	Menilai sejauhmana LPPD yang disusun sesuai dengan mekanisme dan prosedur	melakukan reviu untuk memastikan LPPD yang disusun telah memenuhi mekanisme dan kriteria yang ada	Bulan Januari s/d Maret 2025	Bulan Januari s/d Maret 2025	1	1	1	1	5	9	3.690.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN KHUSUS
							0	0	1	1	11	13	39.000.000		Perjalanan Dinas		
		Reviu LAKIP	Menilai sejauhmana LAKIP yang disusun sesuai dengan mekanisme dan prosedur	melakukan reviu untuk memastikan LAKIP yang disusun telah memenuhi mekanisme dan kriteria yang ada	Bulan Januari s/d Maret 2025	Bulan Januari s/d Maret 2025	1	1	1	1	5	9	738.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN KHUSUS
							0	0	1	1	11	13	39.000.000		Perjalanan Dinas		
4	Reviu Laporan Keuangan	Reviu LPPD	Menilai sejauhmana LKPD yang disusun sesuai dengan mekanisme dan prosedur	melakukan reviu untuk memastikan LKPD yang disusun telah memenuhi mekanisme dan kriteria yang ada	Bulan Januari s/d Maret 2025	Bulan Januari s/d Maret 2025	1	1	1	1	5	9	3.690.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN III
							0	0	1	1	11	13	39.000.000		Perjalanan Dinas		
5	Kerjasama Pengawasan Internal	Kerjasama APIP dengan BPKP atau APH	Menilai sejauhmana Kerjasama APIP dengan BPKP atau APH	Memenuhi kerjasama APIP dengan BPKP atau APH	1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	0	1	1	396.000	1 Laporan	Cetak	-	IRBAN KHUSUS
							1	1	1	1	12	16	3.328.000		Makan & Minum Rapat		
							0	0	1	1	13	15	45.000.000		Perjalanan Dinas		
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Evaluasi Tindak Lanjut	Menilai sejauhmana Tindak Lanjut hasil pemeriksaan APIP dan hasil pemeriksaan BPK RI	Menyajikan dan meningkatkan progres tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan hasil pemeriksaan BPK RI	Bulan Januari s/d Desember 2025	Bulan Januari s/d Desember 2025	0	0	0	0	4	4	96.000.000	1 Laporan	Perjalanan Dinas	-	SELURUH IRBAN
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Perhitungan Kerugian Daerah Permintaan TPKD dan Perhitungan Kerugian Daerah Permintaan APH	Objek Pemeriksaan	Melakukan Identifikasi Perhitungan Kerugian Daerah Permintaan TPKD dan Perhitungan Kerugian Daerah Permintaan APH	1 Tahun	1 Tahun	0	0	1	1	4	6	72.000.000	1 Laporan	Perjalanan Dinas	-	IRBAN KHSUUS
							1	1	1	1	6	10	24.700.000		Perjalanan Dinas		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Pengampu
					RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Penyusunan PKPT dan Panduan Pengawasan	Melakukan identifikasi, menelaah dan memenuhi kebijakan Penyusunan PKPT dan Panduan Pengawasan	Menyusun dan memastikan PKPT dan Panduan Pengawasan terpenuhi dan disusun	1 Tahun	1 Tahun	1	1	1	1	9	13	10.660.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	SELURUH IRBAN
			Rapat melakukan identifikasi, menelaah dan memenuhi kebijakan Penyusunan PKPT dan Panduan Pengawasan	Untuk memastikan mekanisme PKPT dan Panduan Pengawasan akan dipenuhi			1	1	1	1	6	10	90.000.000		Perjalanan Dinas		
			Konsultasi dan koordinasi terkait mekanisme penyusunan PKPT dan Panduan Pengawasan ke BPKP Perwakilan Sumatera Utara	Memastikan penyusunan PKPT dan Panduan Pengawasan telah memenuhi pedoman													
			Rapat finalisasi penyusunan PKPT dan Panduan Pengawasan	Untuk memastikan PKPT dan Panduan Pengawasan telah disusun dan ditetapkan													
			Konsultasi dan koordinasi terkait mekanisme penyusunan PKPT dan Panduan Pengawasan ke BPKP Perwakilan Sumatera Utara	Memastikan penyusunan PKPT dan Panduan Pengawasan telah memenuhi pedoman													
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko	Menilai sejauhmana kebijakan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Memastikan Kebijakan Manajemen Risiko sudah terpenuhi pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	0	0	0	-	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	SELURUH IRBAN
							1	1	1	1	4	8	24.000.000		Perjalanan Dinas		
		Penyusunan Kebijakan LHKPN/ LHKASN	Menilai sejauhmana kebijakan LHKPN/LHKASN yang sudah terpenuhi	Memastikan Kebijakan LHKPN/LHKASN sudah terpenuhi sesuai dengan pedoman yang ada	1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	0	0	0	-	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN II
							1	1	1	1	4	8	24.000.000		Perjalanan Dinas		
		Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Menilai sejauhmana kebijakan Reformasi Birokrasi yang sudah terpenuhi	Memastikan Kebijakan Reformasi Birokrasi sudah terpenuhi sesuai dengan pedoman yang ada	1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	0	0	0	-	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN I
							1	1	1	1	5	9	27.000.000		Perjalanan Dinas		
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Pencapaian SPM	Rapat dalam rangka rencana melakukan pendampingan dan asistensi pelaksanaan pencapaian SPM Tahun 2025	Menyusun Rencana Aksi dalam rangka pendampingan dan asistensi pelaksanaan pencapaian SPM Tahun 2025	1 Tahun	1 Tahun	1	1	1	1	6	10	1.640.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN III
			Konsultasi dan koordinasi terkait pendampingan dan asistensi pelaksanaan pencapaian SPM ke Inspektorat Propinsi Sumatera Utara atau ke Bagian Ekonomi Kantor Gubernur Sumatera Utara	Melakukan Konsultasi dan koordinasi Rencana Aksi terkait pendampingan dan asistensi pelaksanaan pencapaian SPM ke Inspektorat Propinsi Sumatera Utara atau ke Bagian Ekonomi Kantor Gubernur Sumatera Utara			0	0	1	1	4	6	15.000.000		Perjalanan Dinas		
		Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Pencapaian NSPK	Menilai sejauhmana Pelaksanaan Pencapaian NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)	Memastikan Pelaksanaan pencapaian NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) berjalan sesuai dengan ketentuan	1 Tahun	1 Tahun	1	1	1	1	6	10	1.640.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN I
							0	0	1	1	3	5	12.500.000		Perjalanan Dinas		
		Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Pencapaian Penilaian Risiko	Rapat dalam rangka rencana pendampingan dan asistensi Pelaksanaan	Menyusun Rencana Aksi dalam rangka pendampingan dan asistensi pelaksanaan	1 Tahun	1 Tahun	1	1	1	1	6	10	1.640.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN I
			Konsultansi dan Koordinasi terkait teknis pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2025 ke BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera	Konsultansi dan Koordinasi terkait teknis pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2025 ke BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara			0	0	1	1	4	6	15.000.000		Perjalanan Dinas		
			Rapat dalam rangka rencana melakukan pendampingan dan asistensi pelaksanaan Evaluasi P3DN Tahun 2025	Menyusun Rencana Aksi dalam rangka pendampingan dan asistensi pelaksanaan Evaluasi P3DN Tahun 2025													

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Pengampu
					RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Evaluasi Stunting	Menilai sejauhmana Pelaksanaan evaluasi Stunting	Memastikan Pelaksanaan Evaluasi Stunting berjalan sesuai dengan ketentuan	1 Tahun	1 Tahun	1	1	1	1	6	10	1.640.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN I
							0	0	1	1	3	5	12.500.000		Perjalanan Dinas		
		Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Evaluasi PAPBJ	Menilai sejauhmana Pelaksanaan Evaluasi PAPBJ	Memastikan Pelaksanaan Evaluasi PAPBJ berjalan sesuai dengan ketentuan	1 Tahun	1 Tahun	1	1	1	1	6	10	1.640.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN I
							0	0	1	1	4	6	15.000.000		Perjalanan Dinas		
		Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Evaluasi P3DN	Rapat dalam rangka rencana melakukan pendampingan dan asistensi pelaksanaan Evaluasi P3DN Tahun 2025	Menyusun Rencana Aksi dalam rangka pendampingan dan asistensi pelaksanaan Evaluasi P3DN Tahun 2025	1 Tahun	1 Tahun	1	1	1	1	6	10	1.640.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN I
			Konsultasi dan Koordinasi terkait teknis pelaksanaan Evaluasi P3DN Tahun 2025 ke BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara	Konsultasi dan Koordinasi terkait teknis pelaksanaan Evaluasi P3DN Tahun 2025 ke BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara			0	0	1	1	4	6	15.000.000		Perjalanan Dinas		
			Rapat dalam rangka rencana melakukan pendampingan dan asistensi pelaksanaan Evaluasi P3DN Tahun 2025	Menyusun Rencana Aksi dalam rangka pendampingan dan asistensi pelaksanaan Evaluasi P3DN Tahun 2025													
		Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Evaluasi Inflasi	Menilai sejauhmana Pelaksanaan Evaluasi Inflasi	Memastikan Pelaksanaan Evaluasi Inflasi berjalan sesuai dengan ketentuan	1 Tahun	1 Tahun	1	1	1	1	6	10	1.640.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN I
							0	0	1	1	4	6	15.000.000		Perjalanan Dinas		
		Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Evaluasi Investasi	Menilai sejauhmana Pelaksanaan Evaluasi Investasi	Memastikan Pelaksanaan Evaluasi Investasi berjalan sesuai dengan ketentuan	1 Tahun	1 Tahun	1	1	1	1	6	10	1.640.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN I
							0	0	1	1	4	6	15.000.000		Perjalanan Dinas		
		Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik	Menilai sejauhmana Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik	Memastikan Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik berjalan sesuai dengan ketentuan	1 Tahun	1 Tahun	1	1	1	1	5	9	1.476.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat	-	IRBAN I
							0	0	1	1	2	4	24.000.000		Perjalanan Dinas		
1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Evaluasi PMPRB	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Seluruh Perangkat Daerah Pelaksana sesuai dengan Rencana Aksi	Melakukan evaluasi intern dan penilaian mandiri/intern atas pelaksanaan RB Tahun 2024	1 Tahun	1 Tahun	1	1	1	1	15	19	15.580.000	1 Laporan	Makan dan Minum Rapat	-	IRBAN III
				Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka penyampaian LHE RB tahun 2024 dan Konsultasi terkait penyusunan, Road Map, Rencana Aksi RB dan Teknis Evaluasi Tahun 2025 Ke Kementerian RB Jakarta			0	0	1	1	4	6	168.000.000		Perjalanan Dinas		
				Evaluasi RB TW I Tahun 2025			0	0	1	1	1	3	7.500.000		Perjalanan Dinas		
				Evaluasi RB TW II Tahun 2025													
				Evaluasi RB TW III Tahun 2025													
				Konsultasi dan Koordinasi terkait Evaluasi s/d TW 3 tahun 2025 dan realisasi Rencana Aksi tahun 2025 ke Kemenpan RB													
		Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	Menilai sejauhmana Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	Memastikan Pelaksanaan Evaluasi SAKIP berjalan sesuai dengan ketentuan	1 Tahun	1 Tahun	1	1	1	1	15	19	15.580.000	1 Laporan	Makan dan Minum Rapat	-	IRBAN KHUSUS
							0	0	1	1	4	6	168.000.000		Perjalanan Dinas		
							0	0	1	1	2	4	10.000.000		Perjalanan Dinas		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Pengampu
					RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pelaksanaan Evaluasi Maturitas SPIP	Evaluasi Maturitas SPIP Periode Penilaian 1 Juli 2024 s/d 30 Juni 2025	Melakukan rapat terkait rencana evaluasi dan penilaian mandiri Maturitas SPIP periode penilaian 1 Juli 2024 s/d 30 Juni 2025	1 Tahun	1 Tahun	1	1	1	1	25	29	14.268.000	1 Laporan	Makan dan Minum Rapat	-	SELURUH IRBAN
				Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait rencana penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Maturitas SPIP periode penilaian 1 Juli 2024 s/d 30 Juni 2025			0	0	1	1	6	8	96.000.000		Perjalanan Dinas		
				Melakukan pendampingan penilaian mandiri terhadap perangkat daerah maturitas SPIP periode 1 Juli 2024 s/d 30 Juni 2025													
				Melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP periode penilaian 1 Juli 2024 s/d 30 Juni 2025													
				Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait hasil penjaminan kualitas Maturitas SPIP periode penilaian 1 Juli 2024 s/d 30 Juni 2025													
		Pelaksanaan Evaluasi Kapabilitas APIP	Evaluasi dan Pemantauan Kapabilitas APIP periode 1 Juli 2024 s/d 30 Juni 2025	Melakukan rapat terkait rencana evaluasi dan pemantauan implementasi Kapabilitas APIP periode penilaian 1 Juli 2024 s/d 30 Juni 2025	1 Tahun	1 Tahun	1	1	1	1	25	29	14.268.000	1 Laporan	Makan dan Minum Rapat	-	SELURUH IRBAN
				Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait rencana penilaian mandiri dan penjaminan Kapabilitas APIP periode penilaian 1 Juli 2024 s/d 30 Juni 2025			0	0	1	1	6	8	96.000.000		Perjalanan Dinas		
				Melakukan penilaian mandiri Kapabilitas APIP periode 1 Juli 2024 s/d 30 Juni 2025													
				Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait hasil penilaian mandiri dan menyampaikan penjaminan kualitas Kapabilitas APIP periode penilaian 1 Juli 2024 s/d 30 Juni 2025													
		3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pelaksanaan MCP dan STRANAS PK	Menilai sejauhmana pelaksanaan MCP dan Stranas PK sesuai dengan indikator yang dibutuhkan	Memastikan pelaksanaan MCP dan Stranas PK dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan indikator yang dibutuhkan pada setiap pelaporan	1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	0	1	1	2.236.000	2 Laporan	ATK
1	1								1	1	26	30	9.360.000	Makan dan Minum Rapat			
0	0								1	1	2	4	56.000.000	Perjalanan Dinas			
0	0								1	1	5	7	84.000.000	Perjalanan Dinas			
Saber Pungli	Menilai sejauhmana pelaksanaan Saber Pungli sesuai dengan indikator yang dibutuhkan			Memastikan pelaksanaan Saber Pungli dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan indikator yang dibutuhkan pada setiap pelaporan	1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	0	1	1	16.032.000	6 Laporan	Cetak	-	IRBAN KHUSUS
							1	0	1	0	6	8	4.992.000		Makan dan Minum Rapat		
							0	0	1	0	9	10	120.000.000		Perjalanan Dinas		
							0	0	1	0	9	10	104.000.000		Perjalanan Dinas		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Pengampu
					RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	LHKPN/LHKASN	Menilai sejauhmana pelaporan LHKPN/LHKASN oleh pihak yang wajib lapor	Memastikan pelaporan LHKPN/LHKASN telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditetapkan	1 Tahun	1 Tahun	0	0	1	1	15	17	51.000.000	1 Laporan	Perjalanan Dinas	-	IRBAN II
		Pembangunan Zona Integritas	Menilai sejauhmana Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan target yang ditetapkan	Memastikan Pembangunan Zona Integritas berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1 Tahun	1 Tahun	0	0	1	1	15	17	51.000.000	1 Laporan	Perjalanan Dinas	-	IRBAN I
		Penyuluhan Anti Korupsi	Menilai sejauhmana Penyuluhan Anti Korupsi sesuai dengan target yang ditetapkan	Memastikan Penyuluhan Anti Korupsi berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	0	1	1	1.152.000	1 Laporan	ATK	-	IRBAN KHUSUS
							0	0	0	0	1	1	14.698.000	1 Laporan	Cetak		
							0	0	0	0	125	125	31.000.000	1 Laporan	Makan & Minum Rapat		
							0	0	0	0	1	1	3.600.000	1 Laporan	Sewa Gedung		
							0	0	0	0	1	1	9.200.000	1 Laporan	Transport Tenaga Ahli		
							0	0	0	0	4	4	38.400.000	1 Laporan	Honor Tenaga Ahli		
														200.050.000			

Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

DIMPOSMA SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Pembina (IV/a)
NIP.19870704 201101 1 008